



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SLAMET SETYO BUDI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **413177**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/190 m2 di KOTA SALATIGA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 696 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.  
160.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KOTA SALATIGA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 808 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 160.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 300.300.000

1. MOTOR, YAMAHA 28D/MIO/A Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 34P/MIO/TEEN Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
293.300.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 26.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 152.707.678

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.499.007.678

**III. HUTANG** Rp. 60.306.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.438.701.678

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.